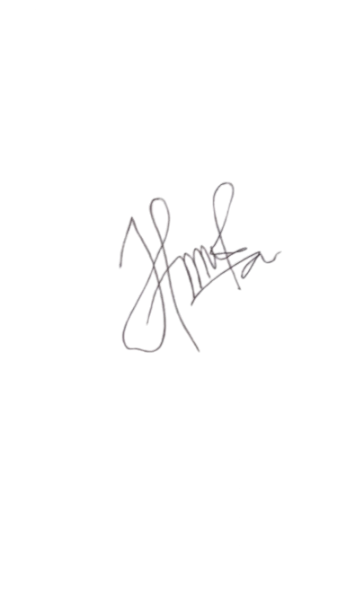
BUKU JAWABAN UJIAN (BJU) UAS

***TAKE HOME EXAM* (THE) SEMESTER 2023/2024 Genap (2024.1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Mahasiswa | : Mohammad Roni Alfan |
| Nomor Induk Mahasiswa/NIM | : 052226299 |
| Tanggal Lahir | : 02 Agustus 1979 |
| Kode/Nama Mata Kuliah | : HKUM4403 / Ilmu Perundang- Undangan |
| Kode/Nama Program Studi | : 311 / Ilmu Hukum |
| Kode/Nama UT-Daerah | : 74 / Malang |
| Hari/Tanggal UAS THE | : Jumat, 05 Juli 2024 |



Tanda Tangan Peserta Ujian

# Petunjuk

1. Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman ini.
2. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik.
3. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan.
4. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TERBUKA

**BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA**

# Surat Pernyataan Mahasiswa Kejujuran Akademik

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa NIM

Kode/Nama Mata Kuliah Fakultas

Program Studi

: Mohammad Roni Alfan

: 052226299

: HKUM4403 / Ilmu Perundang- Undangan

: Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

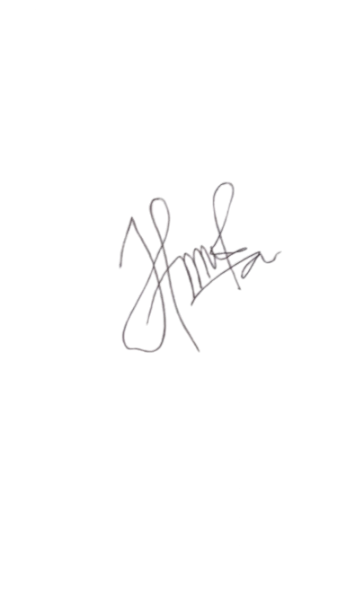
: Ilmu Hukum

UT-Daerah : Malang

1. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi THE pada laman https://the.ut.ac.id.
2. Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun.
3. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal ujian UAS THE.
4. Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain (menyalin dan mengakuinya sebagai pekerjaan saya).
5. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka.
6. Saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarluaskan soal dan jawaban UAS THE melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik Universitas Terbuka.

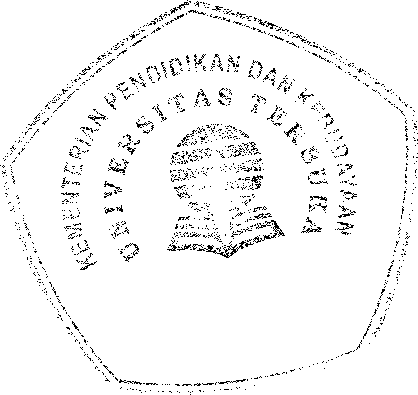
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka.

Malang, 06 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan

Mohammad Roni Alfan

**BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA**



* 1. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek berikut:

**Dasar Negara**: Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pijakan utama dalam seluruh proses pembentukan perundang-undangan.

**Pedoman Ideologis**: Pancasila memberikan pedoman ideologis yang harus diikuti dalam penyusunan undang-undang. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan yang harus ditaati.

**Prinsip dalam Perundang-Undangan**: Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam setiap aspek perundang-undangan, baik dalam proses perumusan maupun isi materi dari undang-undang yang dihasilkan. Misalnya, prinsip keadilan sosial berarti bahwa undang-undang harus memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, tidak diskriminatif, dan berpihak kepada kepentingan bersama.

**Pengawasan Konsitusional**: Mahkamah Konstitusi Indonesia menggunakan Pancasila sebagai salah satu tolak ukur dalam memeriksa keabsahan undang-undang, apakah sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila atau tidak.

**Pendidikan Kewarganegaraan**: Pancasila diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah untuk menanamkan pemahaman yang baik kepada generasi muda tentang nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara.

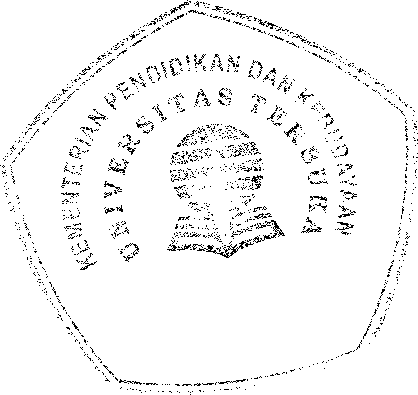
Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi semacam manifesto atau pernyataan semata, tetapi menjadi inti yang mendasari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk dalam proses pembentukan dan penerapan perundang-undangan

* 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang berbeda tetapi saling terkait dalam menjaga ideologi Pancasila di Indonesia:

**Peran BPIP sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila:**

BPIP bertanggung jawab dalam mempromosikan, mengembangkan, dan menjaga keutuhan ideologi Pancasila di tengah masyarakat Indonesia. BPIP berperan dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada berbagai lembaga negara, termasuk DPR, pemerintah daerah, dan instansi lainnya, untuk memastikan kebijakan dan keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

**BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA**



**Peran Mahkamah Konstitusi (MK):**

MK adalah lembaga yang bertugas menegakkan konstitusi, termasuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. MK memastikan bahwa undang-undang yang disahkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara.

**Hubungan Antara BPIP dan MK:**

Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, BPIP dan MK memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga keutuhan ideologi Pancasila. BPIP dapat memberikan pandangan dan rekomendasi kepada MK terkait aspek ideologi Pancasila dalam kasus-kasus yang diuji, memberikan sudut pandang ideologis yang mendukung keputusan MK. MK dalam menjalankan fungsi pengawasannya, dapat mengacu pada panduan dan interpretasi yang diberikan oleh BPIP tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila seharusnya diterjemahkan dan diterapkan dalam konteks hukum. Dengan demikian, BPIP dan MK secara bersama-sama memainkan peran penting sebagai "the guardian of ideology" di Indonesia, meskipun melalui pendekatan yang berbeda: BPIP dalam aspek pendidikan, pengembangan, dan promosi ideologi Pancasila; sedangkan MK dalam aspek pengujian dan penegakan hukum yang berlandaskan pada konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

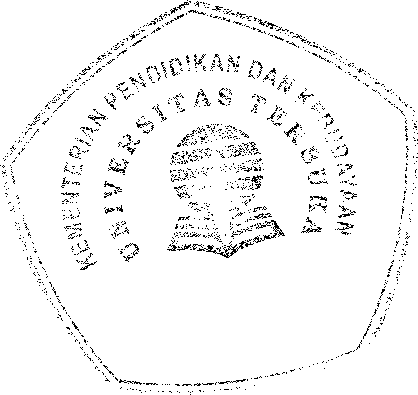
1. Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memiliki kewenangan yang penting dalam membuat putusan yang dapat menciptakan atau mengubah norma hukum baru dalam sistem perundang-undangan. Berikut adalah analisis mengenai kewenangan MK dalam hal ini:

**Pengujian Undang-Undang:** MK memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketika MK menguji suatu undang-undang dan menemukan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, MK dapat memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (null and void). Dalam hal ini, MK tidak hanya menegaskan ketidakberlakuan undang-undang yang diuji, tetapi juga memberikan sinyal terhadap perubahan yang mungkin diperlukan dalam sistem perundang-undangan untuk memastikan kesesuaian dengan konstitusi.

**Pemutusan Kewenangan:** MK dapat memutuskan kewenangan pemerintah atau lembaga lain dalam hal tertentu, misalnya ketika pemerintah melakukan kebijakan atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Contoh konkret adalah dalam kasus pemerintah daerah yang melanggar otonomi daerah atau melakukan tindakan yang merugikan hak asasi manusia.

**Interpretasi Konstitusi:** MK juga berwenang untuk memberikan interpretasi terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. Dalam melakukan interpretasi, MK dapat memberikan pemahaman baru atau lebih mendalam terhadap

**BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA**



nilai-nilai dasar Pancasila yang mendasari konstitusi, yang dapat berpengaruh pada pembentukan norma hukum baru atau pengubahan norma hukum yang sudah ada.

**Pemutusan Sengketa Pemilu:** Selain itu, MK juga memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa hasil pemilu. Putusan MK dalam sengketa pemilu dapat menciptakan preseden hukum baru yang mengatur proses pemilu di masa mendatang, yang kemudian menjadi bagian dari norma hukum yang mengatur sistem politik di Indonesia.

**Pengujian Peraturan Daerah:** MK juga dapat menguji peraturan daerah (perda) terhadap UUD 1945. Putusan MK terkait perda yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dapat mempengaruhi praktik legislasi di tingkat daerah, mengarah pada perubahan atau penyusunan ulang perda yang sesuai dengan norma konstitusional.

Dengan demikian, kewenangan MK dalam membuat putusan yang menciptakan atau mengubah norma hukum baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sangatlah signifikan. Putusan MK tidak hanya berdampak pada kasus individual yang sedang diuji, tetapi juga dapat membentuk landasan hukum baru atau merespons perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, peran MK sebagai penjaga konstitusi dan pengawas dalam sistem perundang-undangan sangat penting untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945.

1. Apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tetap memungkinkan untuk dilakukan pembahasan di tingkat legislatif. Namun, prosesnya akan lebih kompleks dan memerlukan upaya tambahan untuk memasukkan RUU tersebut ke dalam agenda pembahasan legislatif. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

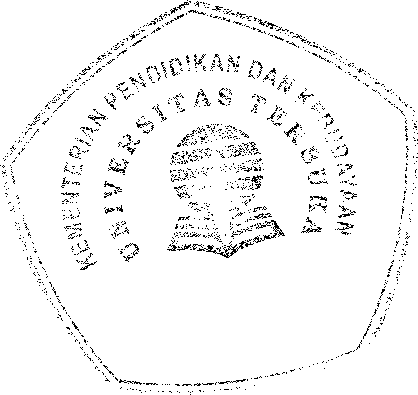
**Inisiasi dan Pengajuan RUU:** RUU dapat diajukan oleh anggota DPR, pemerintah, atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke Badan Legislasi DPR. Setelah itu, Badan Legislasi DPR akan menilai dan mengatur prioritas RUU tersebut untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas atau agenda legislatif lainnya.

**Pengajuan Inisiatif DPR:** Anggota DPR dapat mengajukan RUU tanpa melalui Prolegnas, yang kemudian akan diteruskan ke Badan Legislasi untuk dipertimbangkan.

**Pengaturan Pembahasan:** Jika RUU tidak termasuk dalam Prolegnas, Badan Legislasi DPR dapat memasukkan RUU tersebut dalam agenda pembahasan legislatif secara khusus. Hal ini biasanya dilakukan dengan memprioritaskan RUU tersebut dalam daftar pembahasan di rapat paripurna atau komisi-komisi terkait.

**Persetujuan Pengesahan:** Untuk RUU yang dibahas di luar Prolegnas, tetap harus melalui proses persetujuan

**BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA**



di DPR, dimana RUU tersebut akan dibahas dan disahkan dengan mekanisme yang sama seperti RUU yang masuk dalam Prolegnas.

**Tantangan dan Kompleksitas:** Pembahasan RUU yang tidak masuk Prolegnas dapat menghadapi tantangan dalam hal pengalokasian waktu dan sumber daya legislatif. Pengusahaannya untuk mendapatkan persetujuan dan mendapatkan dukungan yang diperlukan dari anggota DPR membutuhkan strategi politik yang matang.

Dengan demikian, meskipun tidak masuk dalam Prolegnas, RUU tetap bisa dibahas di DPR dengan catatan harus melewati proses yang lebih intensif dan memerlukan dukungan politik yang kuat.

1. Pembuatan naskah akademik dalam ilmu perundang-undangan memerlukan perhatian khusus terhadap beberapa unsur yang penting untuk memastikan keberhasilan dan kualitas karya tersebut. Berikut adalah unsur-unsur yang harus ada dalam pembuatan naskah akademik dalam ilmu perundang-undangan:

**Judul yang Jelas dan Deskriptif:** Judul harus mencerminkan secara tepat topik atau masalah yang dibahas dalam naskah. Judul yang jelas membantu pembaca untuk memahami konten naskah sebelum membaca lebih lanjut.

**Pendahuluan yang Informatif:** Pendahuluan harus memberikan latar belakang yang cukup mengenai topik yang dibahas. Pendahuluan juga sebaiknya memuat rumusan masalah, tujuan penulisan, dan kegunaan dari naskah tersebut.

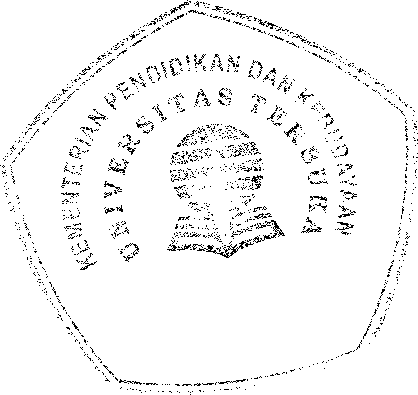
**Rumusan Masalah:** Penulis harus menjelaskan secara jelas dan tajam mengenai masalah yang akan diangkat. Rumusan masalah menjadi landasan bagi pembaca untuk memahami fokus utama dari naskah.

**Tinjauan Pustaka yang Komprehensif:** Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting dalam naskah akademik. Penulis harus mengacu pada sumber-sumber teori, hukum, dan penelitian terkait yang relevan dengan topik yang dibahas. Tinjauan pustaka harus menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap kajian sebelumnya dan relevansinya dengan masalah yang dibahas.

**Metode Penelitian atau Pendekatan Analisis:** Bagian ini diperlukan terutama dalam naskah yang bersifat empiris atau analitis. Penulis harus menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan atau pendekatan analisis yang diterapkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

**Pembahasan yang Sistematik:** Pembahasan harus menguraikan secara sistematis analisis terhadap masalah yang dibahas. Pembahasan harus didasarkan pada data atau bukti yang kuat, baik berupa hukum, kebijakan, atau fakta empiris terkait.

**BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA**



**Kesimpulan yang Tegas:** Kesimpulan harus memberikan ringkasan dari temuan utama dalam naskah dan mengaitkannya kembali dengan rumusan masalah. Kesimpulan juga harus mampu memberikan jawaban atau rekomendasi terhadap masalah yang telah diangkat.

**Daftar Pustaka yang Terperinci:** Naskah akademik harus mencantumkan daftar pustaka yang lengkap dan terperinci. Daftar pustaka harus mencakup semua referensi yang digunakan dalam naskah dan mematuhi aturan penulisan yang berlaku (seperti APA, MLA, atau Chicago style).

**Gaya Penulisan yang Jelas dan Akurat:** Naskah harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang jelas, akurat, dan sesuai dengan tata bahasa yang baik. Hindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau tidak jelas artinya.

**Penyuntingan dan Proofreading:** Sebelum naskah akademik dipublikasikan atau diserahkan, pastikan untuk melakukan penyuntingan dan proofreading secara menyeluruh. Pastikan tidak ada kesalahan tata bahasa, ejaan, atau format yang dapat mengganggu kesan profesional naskah.

Dengan memperhatikan unsur-unsur di atas, penulis dapat meningkatkan kualitas naskah akademiknya dalam ilmu perundang-undangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum.